

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi program itsbat nikah di Kecamatan Syamtalira Bayu, dengan permasalahan utama terkait kendala sumber daya keuangan dan kurangnya komunikasi antar pelaksana dengan masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Grand teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III dan Edward III, yang menekankan pentingnya aspek sumber daya, komunikasi, kerja sama, dan disposisi pelaksana dalam keberhasilan keberlanjutan sebuah kebijakan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terhadap narasumber terkait, seperti Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam dan KUA Kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan itsbat nikah dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang stabil dan transparan dari pemerintah, disposisi positif petugas, serta komunikasi efektif antar instansi. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang baik dan kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor pendukung utama. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan dan efektivitas program sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang transparan, serta motivasi dan komitmen pelaksana di lapangan. Saran yang diberikan meliputi perlunya peningkatan alokasi anggaran yang berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas lembaga, serta pelatihan motivasi dan kompetensi petugas sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan program di masa depan.

Kata kunci : Implementasi, istbat nikah, Pencatatan Perkawinan, Legalisasi, masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to thoroughly examine the implementation of the legalization of marriage (Istbat Nikah) in Syamtalira Bayu Subdistrict, Aceh Utara Regency. Istbat Nikah is a process of legalizing marriages that have been conducted religiously and also carry implications for legal recognition in administrative law. The program's execution is expected to facilitate married couples in obtaining marriage certificates, thereby providing legal protection and access to various public services. However, the implementation still faces several challenges, such as low levels of socialization, limited public understanding of the importance of marriage registration, insufficient budget allocation, and suboptimal coordination among related institutions such as KUA (Office of Religious Affairs) and Sharia Court. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and document studies. The results indicate that although there is a commitment from the government and relevant institutions to support this program, the main challenges that need to be addressed are enhancing the effectiveness of communication and socialization, as well as ensuring adequate resource availability. Furthermore, the success of this program heavily depends on good collaboration and coordination among stakeholders and strong community support. Innovative and sustainable strategies are necessary to overcome existing obstacles so that the implementation of Istbat Nikah can be more effective, efficient, and maximally beneficial for the community.

Keywords: *implementation, Istbat Nikah, marriage registration, community*